

Judul : Sopir jadi korban OPM, perkuat perlindungan warga sipil di Papua
Tanggal : Minggu, 20 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Sopir Jadi Korban OPM Perkuat Perlindungan Warga Sipil Di Papua

SENAYAN mengecam penembakan yang menewaskan Aris Sanda, seorang sopir asal Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) di jalur Wamena-Mbua, di Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan, Kamis (17/9/2026). Kasus ini menunjukkan keselamatan masyarakat sipil masih terancam di wilayah konflik Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta meminta aparat keamanan mengungkap kronologi, pelaku, motif, serta memastikan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai warga sipil menjadi korban karena tuduhan sepihak.

"Negara perlu memastikan siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum," tegas Sukamta di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Sebelumnya, Aris dilaporkan dihentikan dan disandera kelompok bersenjata sebelum kemudian ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya yang terbakar di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab dan menyebut korban sebagai agen intelijen yang menyamar sebagai sopir.

Sukamta melanjutkan, tuduhan TPNPB-OPM kepada Aris dan menuding sebagai agen intelijen yang menyamar sebagai sopir masih merupakan klaim pihak pelaku. Karena apa pun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi

alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. "Keselamatan warga sipil menjadi prioritas utama," tegasnya.

Sukamta meminta Pemerintah meningkatkan deteksi dini dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, khususnya pada jalur transportasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. "Pengamanan mesti berbasis pencegahan dengan memperkuat intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan masyarakat di titik titik rawan," harap politisi PKS ini.

Sukamta menilai, ancaman terhadap sopir, pengemudi angkutan, pekerja, dan masyarakat yang melintas di wilayah rawan dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta pelayanan dasar masyarakat Papua. Jangan sampai masyarakat takut bekerja, bepergian, atau takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. "Negara wajib hadir memberikan rasa aman," kata dia menekankan.

Selain itu, Sukamta mendorong pendekatan keamanan yang tetap menempatkan perlindungan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan sebagai bagian penting dari penyelesaian persoalan Papua. Karena keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan.

"Masyarakat Papua membutuhkan ruang hidup yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan," kata legislator asal Yogyakarta ini. ■ BSH